



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TONI INDRAYANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 764456

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.690.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/54 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/70 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , WARISAN Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m²/45 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 218.500.000

1. MOBIL, HONDA HRV 1.5E Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 271.191.300**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 860.065.680**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.039.756.980**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.039.756.980

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.